

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi *Electronic Government* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

6.1.1 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP belum efektif dan mengalami kendala dalam implementasinya. DPMPTSP telah berhasil dalam menerapkan SIPPT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan. Namun dalam pengembangan *E-Gov* dengan menerapkan Aplikasi SPESIAL masih terhambat. Hal tersebut karena kurangnya fasilitas serta anggaran.

6.1.2 Adapun indikator yang menyebabkan implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP belum efektif adalah sebagai berikut:

➤ Komunikasi

Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat *E-Gov* dalam kaitannya dengan pelayanan perijinan. Sehingga aplikasi *E-Gov* (Aplikasi SPESIAL, SIPPT, Website dan Aplikasi *SMS Gateway*) hanya dimanfaatkan oleh agen pelaksana (DPMPTSP) dalam pelayanan perijinan.

➤ Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian, sumberdaya (manusia, fasilitas, anggaran) yang dimiliki oleh DPMPTSP masih mengalami kendala. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam penguasaan teknologi masih terbatas, fasilitas (server) yang masih terbatas dalam pengembangan *E-Gov* serta anggaran yang dimiliki sangat terbatas untuk mendukung implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP. Oleh karena itu aplikasi SPESIAL dan *SMS Gateway* yang sudah dimiliki tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

➤ Disposisi

Berkaitan dengan sikap dan konsistensi implementor dalam menerapkan *E-Government* pada DPMPTSP. Berdasarkan hasil penelitian, Pimpinan Daerah (Gubernur NTT) maupun Kepala DPMPTSP telah memiliki komitmen untuk menerapkan *E-Gov* dengan jenis Aplikasi SPESIAL sebagai inovasi pelayanan perijinan dalam bentuk MOU kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jabar. Namun dalam pelaksanaannya masih *step by step* sehingga membutuhkan perbaikan secara *continue* dalam penyempurnaan aplikasi yang diterapkan. Selain itu, perlu adanya insentif bagi pegawai jika ada lembur ataupun staf ahli untuk meningkatkan semangat dan komitmen mereka dalam menerapkan *E-Gov* pada penyelenggaraan pelayanan.

➤ Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki DPMPTSP dalam pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil penelitian, SOP yang dimiliki oleh DPMPTSP masih dalam tahap untuk pengesahan. Pasca penggabungan KPPTSP dan BPMD menjadi DPMPTSP menyebabkan SOP yang digunakan dalam pelayanan perijinan masih menggunakan SOP sebelumnya pada KPPTSP yang materinya tidak jauh berbeda dengan SOP yang akan disahkan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah, maupun DPMPTSP sebagai agen dalam implementasi *E-Gov* dengan jenis aplikasi perijinan harus meningkatkan sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai manfaat *E-Gov* dalam aplikasi perijinan, sehingga aplikasi yang telah diterapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan.
- Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi *E-Gov* dengan jenis aplikasi perijinan Pemerintah Daerah harus mendukung melalui Sumberdaya, Fasilitas serta anggaran sehingga dapat mendukung pengembangan *E-Gov*.
- Diharapkan kepada masyarakat sebagai pemohon ijin, untuk memiliki kesadaran dan penghargaan terhadap bentuk implementasi *E-Gov* dengan jenis

aplikasi perijinan yang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perijinan.

- Perlu adanya insentif bagi para pegawai khususnya staf ahli teknologi guna meningkatkan semangat dan komitmen mereka dalam mendukung implementasi *E-Gov* pada DPMPTSP NTT

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Inu Kencana Syafie (2010), *Ilmu Politik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kansil (1995), *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Denhardt dan Denhardt (2003), *Pelayanan Publik Baru*. Bantul: Kreasi Wacana
- Abdul Wahab, Solichin (2001), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Dunn, William N. (2003), *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Deddy Mulyadi (2016), *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Widodo (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, econd edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- A.G. Subarsono (2006), *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kurniawan, Teguh. (2006). *Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Government di Indonesia*.
- Akadun, *Teknologi Informasi Administrasi (Bandung: Alfabeta,2009)*
- Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government* .Yogyakarta: ANDI,2006

Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

**Internet:**

<http://perizinan.nttprov.go.id/sipptntt/>

Firdayanti,

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14705/SKRIPSI%20LENGKAP\\_FIRDAYANTI%20RUSLAN.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14705/SKRIPSI%20LENGKAP_FIRDAYANTI%20RUSLAN.pdf?sequence=1) , 21-09

**Skripsi:**

Raymundus (2013), “Penguatan Kapasitas dalam Penerapan *E-Government* pada UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kota Kupang”

Siti Mutia Nurcahyani Liputo (2015), “Penerapan *E-Government* Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”

Firdayanti Ruslan (2015), “*Pemanfaatan SMS Gateway dalam Meningkatkan Pelayanan pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*”

**Jurnal:**

Djohermansyah Djohan (2011), *Naskah Akademik* mantan DIRJEN Otda Kemendagri.

Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Azis, Herry Abdul (2008). “Integrasi e-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi”. Jakarta: *Seminar Pelayanan Publik dan E-government*, Bappenas, 19 Desember 2008.

**Sumber Lain:**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*  
*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

*(In-depth Interview)*

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) NUSA TENGGARA TIMUR**

---

#### **A. PENJELASAN UMUM**

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas akhir.
2. Penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun.
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara tepat dan jujur demi kelancaran dan ketetapan analisis hasil penelitian.
4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i meluangkan waktu, tenaga dan pikiran peneliti menyampaikan terima kasih.

#### **B. IDENTITAS RESPONDEN**

Identitas Responden :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Alamat :

#### **C. DAFTAR PERTANYAAN**

##### **A. Komunikasi**

1. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan *E-Government* pada DPMPTSP NTT?
2. Apakah informasi yang diterima mengenai pelaksanaan *E-Government* mencakup kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi?

3. Media apa saja yang digunakan dalam penyampaian informasi pelaksanaan *E-Government* pada DPMPTSP NTT?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang sering ditemukan dalam proses penyampaian informasi pelaksanaan *E-Government* pada DPMPTSP NTT?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan *E-Government* pada DPMPTSP melalui informasi yang diperoleh?

B. Sumber Daya

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai?
2. Apakah fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan *E-Government* sudah sesuai dengan kebutuhan dalam bekerja?
3. Apa perlu penambahan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan *E-Government*?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan *E-Government*, apakah sudah mencapai target?
5. Apakah alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan *E-Government* sesuai dengan kebutuhan operasional?

C. Disposisi

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perilaku agen pelaksana dalam pelaksanaan *E-Government*?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi agen pelaksana dalam pelaksanaan *E-Government*?

D. Struktur Birokrasi

1. Apakah DPMPTSP sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan *E-Government*?
2. Instansi apa saja yang turut mendukung pelaksanaan *E-Government* berbasis pada DPMPTSP NTT?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan *E-Government* sudah sesuai dengan SOP pada DPMPTSP NTT?

**Catatan: Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam pedoman wawancara ini merupakan pertanyaan penuntun dan akan berkembang pada saat penelitian.**